

PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI MELALUI REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

THE INFLUENCE OF PERCEIVED RISK TO ONLINE PURCHASING DECISIONS IN TANJUNGPINANG

Endri Sanopaka¹, Sri Langgeng Ratnasari², Ferizone³

^{1,3}Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia

²Prodi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email: sarisucahyo@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah melalui peningkatan daya saing investasi, karena dengan makin banyaknya investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau membawa multiplier effect, seperti bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan hidupnya perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas perizinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi investor khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut berperan dalam pembangunan, dan tidak terjadinya permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya masalah dalam perizinan untuk investasi. Tujuan pembangunan akan terwujud dengan peran penuh dari seluruh stakeholder yang ada, yakni Pemerintah, masyarakat, dan Investor.

Kata Kunci: *Daya Saing Investasi, Reformasi Birokrasi, Investasi, Investor*

Abstract

One of the ways to improve community welfare in the Riau Islands Province is through increased investment competitiveness, because increasing investment entering Riau Islands Province has multiplier effects, such as increasing employment, increasing people's purchasing power, and increasing regional income. Therefore, the Regional Government of the Riau Islands Province must make improvements from time to time, especially related to efficiency and licensing in the Riau Islands Province. This has a very big impact on special investors and the community when participating in development, and does not address problems posed by problems in licensing for investment. The development goal will be realized by involving all the existing stakeholders, namely the Government, the community, and Investors.

Keywords: *Investment Competitiveness, Bureaucratic Reform, Investment, Investors*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau pernah mencapai sebuah titik optimum di Tahun 2013 dengan angka 7,21% dan kemudian terus menurun sampai dengan angka minimum terjadi di tahun 2017 pada titik angka 2% dan perlahan kembali pulih

sampai di quartal ketiga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada pada titik angka 4,78% dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,04%. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau sebagian besar ditopang oleh sektor lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Dimana lapangan usaha industri pengolahan, serta konstruksi masih terpusat di wilayah Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.

Ketika terjadi kontraksi ekonomi global dan berdampak pada industri-industri berkenaan, maka sangat memberikan dampak yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun pemerintah berupaya untuk memperbaiki sektor lainnya seperti pariwisata dengan berupaya menarik angka kunjungan wisatawan masuk ke Kepulauan Riau baik melalui pintu masuk Kota Batam ataupun Bintan dan Tanjungpinang, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut karena sektor pariwisata perputaran uang tidak terjadi di lingkup masyarakat, karena wisatawan masuk ke destinasi bersifat eksklusif bukan yang dikelola oleh komunitas masyarakat.

Berbeda dengan industri pengolahan dan konstruksi yang aliran pengeluarannya berputar di lingkup pekerja dan masuk ke pasar-pasar yang dikelola oleh komunitas masyarakat, sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi secara masal. Oleh karena itu maka untuk dapat kembali meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi yang untuk beberapa tahun kebelakang berjalan lambat, karena berbagai situasi secara global. Akan tetapi hal-hal yang perlu dibenahi harus sudah dilakukan, seiring dengan semangat dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo yang menginginkan pemerintah memberi kemudahan dalam aspek perizinan untuk berusaha di Indonesia. Dengan masuknya investasi dan realisasi dari investasi tersebut dalam bidang usaha yang membuka lapangan pekerjaan secara masal, maka akan memberikan dampak bagi pembangunan di daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan, maka dirumuskan masalah Bagaimana respon Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan layanan kemudahan berinvestasi?

PEMBAHASAN

Salah satu inovasi dalam reformasi birokrasi yang dicetuskan oleh pemerintah adalah dengan meluncurkan *Mall Pelayanan Publik* di Kota Batam, yang merupakan salah satu dari beberapa *Mall Pelayanan Publik* yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatukan pelayanan publik yang ada di Kota Batam baik pelayanan oleh Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal) juga Badan Pengusahaan Kawasan Batam, serta Kepolisian.

Keberadaan *Mall Pelayanan publik* di Kota Batam memberikan kemudahan baik kepada masyarakat maupun investor yang ingin berusaha di Kota Batam, karena *Mall Pelayanan Publik* dapat menyelesaikan semua jenis pelayanan baik perizinan maupun administrasi kependudukan serta pembayaran pajak dan lainnya tanpa harus berpindah-pindah tempat. Semua jenis pelayanan publik serta perizinan telah dipindahkan ke *mall* pelayanan publik. Hendaknya *Mall* pelayanan publik ini dapat diterapkan juga di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, selain itu juga harus mempersiapkan perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan publik meskipun secara geografis terpisah oleh lautan.



Gambar 1

Mall Pelayanan Publik Kota Batam (Gedung Sumatera Expo – Batam Centre)

Sumber: Hasil Survei Tim EPD Kepri, 2019

Iklim yang kondusif merupakan salah satu prasyarat untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan. Penciptaan iklim yang kondusif tidak saja pada penanganan keamanan, namun juga kepastian hukum dalam berusaha. Penanaman

Modal Asing bersedia menanamkan investasinya di suatu daerah dengan membangun fasilitas produksi yang permanen merupakan bentuk komitmen karena dukungan pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif di dalam berusaha.

Pembukaan kawasan-kawasan ekonomi khusus serta kawasan pelabuhan bebas di Kepulauan Riau menjadi suatu keistimewaan bagi Kepulauan Riau, yang memang secara geografis terletak di antara negara-negara tetangga, serta di daerah lalu lintas jalur perdagangan dunia di selat Melaka dan laut natuna utara.

Selain iklim investasi yang mendukung, juga diperlukan sebuah kepastian hukum dalam menarik investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Beberapa PMA yang sudah melakukan investasi khususnya di sektor pariwisata terpaksa menghentikan operasinya karena masih terkendala oleh perizinan yang belum terselesaikan, meskipun pada awalnya diperkenankan untuk melakukan aktivitas jasa konstruksinya mendahului dari perizinan yang semestinya di peroleh lebih dahulu.

Kebijakan pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing yang mengeluarkan kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang memberikan kemudahan kepada investor asing setelah memperoleh pendaftaran penanaman modal beserta 7 paket izin dan pemenuhan persyaratan yang diterbitkan oleh PTSP pusat/daerah, dapat langsung melakukan konstruksi. Secara paralel pihak investor dapat melaksanakan konstruksi, dan izin lainnya. Akan tetapi ada beberapa kegiatan PMA yang sudah selesai konstruksi tapi tidak dapat beroperasi karena masih terkendala dengan beberapa perizinan yang saling bertentangan antara instansi yang satu dengan lainnya yang punya produk hukum berbeda-beda.

Doulos Phos Hotel Bintan yang dibangun di kawasan Wisata eksklusif Lagoi di Kabupaten Bintan adalah sebuah hotel yang dibangun dengan mengubah fungsi Kapal Pesiar tua berusia 104 tahun. Hotel ini tidak bisa beroperasi meskipun sudah selesai dan

telah launching untuk dinikmati wisatawan dengan harga jual yang cukup tinggi dikarenakan masih ada perizinan yang belum dipenuhi.



Gambar 2

Hotel Doulos Phos di kawasan Wisata Terpadu Eksklusif – Lagoi, Bintan

Sumber: Foto Nur Alam Gauk, 2019

Selain Hotel Doulos Phos Hotel, PMA lainnya yang juga terhambat proses operasionalnya karena masalah perizinan adalah Hotel Agro Beach Resort di Kabupaten Bintan yang diambil alih oleh PMA dari Tiongkok juga terhenti konstruksinya karena persoalan perizinan. Jika kedua hotel ini dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, akan diperoleh keuntungan bagi daerah diantaranya adalah terbukanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran. Selain itu juga manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat setempat dari aktivitas Kunjungan wisatawan mancanegara di daerah tersebut.



Gambar 3

PT. Saipem Indonesia (Perusahaan PMA Italia) di Kabupaten Karimun

Sumber: Tim EPD Kepri, 2019

Salah satu PMA dari Italia yang juga sudah berinvestasi di Kabupaten Karimun dengan total investasi dalam jumlah besar dengan membangun fasilitas pabrik yang pernah mempekerjakan sebanyak 14.000 pekerja. PT. Saipem bergerak dalam bidang infrastruktur Oil & Gas, yang juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi global, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang harus mengurangi jumlah karyawan sehingga tinggal 600 orang saja. Namun pihak perusahaan di tahun 2019 sudah mendapatkan beberapa kontrak yang siap untuk kembali menerima tenaga kerja sampai dengan 4.000 tenaga kerja yang diutamakan adalah mereka yang sudah pernah bekerja di PT. Saipem. Harapan pihak perusahaan adalah agar semua pihak dapat mendukung dan menciptakan kondisi investasi yang kondusif agar nilai investasi yang sudah mereka tanamkan dapat memberikan dampak bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Program pemerintah pusat didalam mendukung terbukanya akses transportasi di daerah dengan pembangunan fasilitas bandar udara di daerah-daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri telah membawa dampak pada perkembangan daerah yang ditandai dengan terjadinya mobilitas keluar masuk orang baik penduduk lokal maupun

wisatawan mancanegara. Persoalan di daerah Kepulauan selain terbatasnya moda transportasi dengan waktu tempuh perjalanan merupakan suatu kendala yang harus dapat diatasi, agar terbuka akses perkembangan ekonomi daerah yang imbasnya diharapkan dapat mensejahterahkan masyarakat.



Gambar 4

Bandara Letung di Pulau Jemaja – Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Tim EPD, 2019

Diperlukan sebuah keberanian untuk melakukan terobosan bagi memperbaiki sistem transportasi di daerah Kepulauan. Tidak cukup hanya dengan membangun bandara dan juga pelabuhan laut sebagai sarana penunjang transportasi, akan tetapi moda transportasi juga diperlukan keberanian untuk direvolusi. Pembukaan bandara selain memakan biaya pembangunan infrastruktur yang cukup besar juga memakan waktu yang cukup panjang. Selain itu juga moda transportasi yang dapat memanfaatkan juga terbatas, kecuali pesawat dengan jenis perintis seperti Fokerdan jenis ATR.

Pihak maskapai juga akan mempertimbangan aspek ekonomis untuk dapat masuk ke bandara-bandara perintis yang sudah dibangun pemerintah dengan melihat jumlah penumpang, begitupun sebaliknya penumpang akan mempertimbangkan harga tiket

yang dijual maskapai. Jika harga tiket dirasakan mahal, maka penumpang akan lebih memilih jalur transportasi laut, meskipun waktu tempuh akan lebih lama. Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan penggunaan moda transportasi pesawat amfibi yang dapat mendarat di laut, sebagaimana yang sudah digunakan oleh salah satu maskapai di Indonesia yang melayani salah satu resort di pulau bawah Kabupaten Kepulauan Anambas.



Gambar 5

Pesawat Amphibi Carteran Yang Melayani Resort Pulau Bawah (Anambas) di Bandara Hang Nadim

Sumber: Tim EPD Kepri, 2019

Dengan menggunakan jenis pesawat amfibi, dapat mengatasi keterbatasan pembangunan bandara di wilayah Kepulauan. Bahkan dapat diintegrasikan pelabuhan untuk digunakan bagi pendaratan pesawat amfibi juga kapal laut bantuan pemerintah untuk daerah-daerah kepulauan dengan menyediakan moda transportasi kapal perintis dengan model Tol Laut seperti yang sudah dilaksanakan saat ini, masih belum efektif, karena kapal-kapal tersebut belum mengatasi masalah waktu tempuh yang cukup lama dan tidak efisien. Kapal-kapal tol laut selain waktu bongkar muat barang di pelabuhan

asal yang cukup lama, juga kecepatan waktu tempuh perjalanan yang belum bisa dimanfaatkan untuk urusan-urusan yang sifatnya mendesak.

Sejak disahkannya Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang menjadi dasar dalam transfer keuangan dari APBN ke Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah mengarah kepada kemandirian desa. Pemerintah desa dengan dukungan ADD dapat merespon kebutuhan masyarakat desa dan mendukung melengkapi pelayanan dasar di desa yang belum tersentuh oleh Pihak Kabupaten. ADD yang menjadi komponen didalam APBDes dikelola secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk terlibat dalam pemanfaatan dana desa. Selain untuk membiayai pelayanan dasar di desa, ADD juga dimanfaatkan untuk membuka Badan Usaha Milik Desa, baik dalam bentuk penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok maupun usaha-usaha produktif sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia di desa. Termasuk di dalam pengembangan BUMDes banyak yang diarahkan dalam mendukung pembukaan destinasi-destinasi Wisata yang terdapat di desa.



Gambar 6

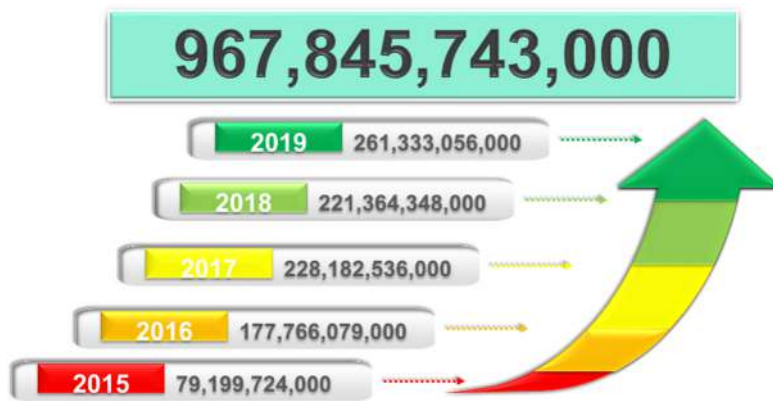
Transparansi Dana Desa Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Tim EPD Kepri, 2019

Sampai dengan tahun 2019, Dana Desa yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa adalah sebesar **Rp. 967.845.743.000,-**. Total desa yang menerima alokasi dana desa tersebut ada 275 desa yang tersebar di lima Kabupaten di Kepulauan Riau, yaitu di Bintan 36 Desa, Karimun 42 Desa, Natuna 70 Desa, Lingga 75 Desa, dan Kepulauan Anambas 52 Desa. Sedangkan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang tidak memperoleh alokasi dana desa karena tidak memiliki desa meskipun karakteristik beberapa Kelurahan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang berkarakteristik pedesaan.

Gambar 6

Alokasi Dana Desa Provinsi Kepri 2015 – 2019 (Dalam Rp.)

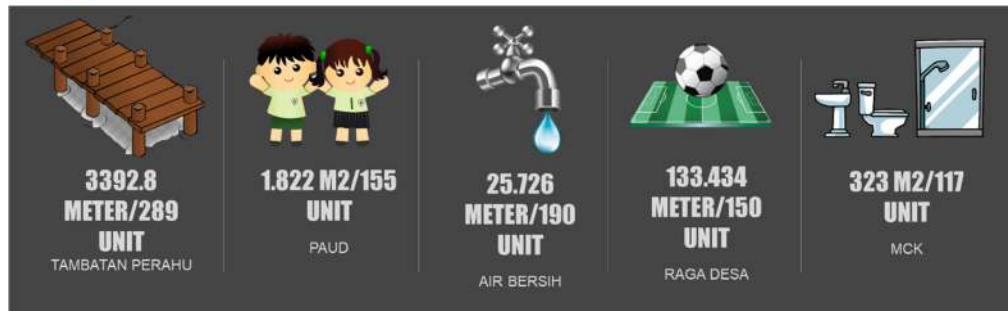


Sumber: Tenaga Ahli Desa Provinsi Kepri, 2019

Gambar 7

Pemanfaatan Dana Desa Sejak Tahun 2015 – 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau





Sumber: Tenaga Ahli Desa Provinsi Kepri, 2019

Penggunaan dana desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dilakukan penguatan kembali, terutama didalam penguatan organisasi bisnis dari BUMDes yang masih berorientasi tradisional bahkan sebagian besar BUMDes yang berjalan saat ini hanya melanjutkan usaha yang sudah berjalan sebelumnya dan sudah ada di desa. Bahkan beberapa diantaranya hanya melakukan pengeumpulan pendapatan dari menjual tiket atau karcis atas wahana Wisata yang dikelola oleh masyarakat ataupun sebelumnya telah menjadi tempat Kunjungan Wisata. Begitu juga usaha perdagangan mengambil alih usaha yang sebelumnya dikelola oleh Koperasi untuk kemudian di atas namakan Koperasi. BUMDes perlu menyesuaikan diri dengan organisasi bisnis yang lebih fleksibel. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes meskipun terikat pada satu Pedoman yang sama, tapi diperlukan sebuah inovasi didalam pengembangan unit bisnis yang dikelola dengan strategis bisnis korporasi bukan koperasi. Hal ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa.

Potensi sumber daya kelautan yang ada di Kepri sangat potensial untuk BUMDes membangun sebuah bisnis pengolahan hasil kelautan, baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun luar negeri yang berorientasi ekspor. Membangun kemitraan dan jejaring bagi BUMDes merupakan langkah strategis, salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai pengepul ataupun pihak ketiga, atau di kalangan nelayan Kepulauan Riau dikenal dengan nama Tauke.

Tauke ini sebagian besar menjadi penampung dari hasil tangkapan nelayan, yang kemudian mereka jual kembali ke luar negeri langsung ataupun melalui pihak

pengumpul lagi di kota. BUMDes perlu berkolaborasi dengan mereka yang sudah memiliki rantai pasar yang potensial untuk pemasaran dalam sebuah wadah unit bisnis di bawah BUMDes dengan menggunakan metode shareholder diantara pihak Desa, BUMDes, dan Tauke. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk dapat memperkuat BUMDes sangat memungkinkan dilakukan di Kepulauan Riau, seiring dengan telah terkoneksi jaringan Palapa Ring yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di Kepulauan Riau.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan observasi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, telah melakukan beberapa hal untuk perbaikan dalam birokrasi perizinan investasi, yakni:

1. Mengoptimalkan layanan di Mall Publik di Kota Batam dalam hal perizinan di bidang investasi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Melakukan peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan stake holder investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Saran

Untuk meningkatkan layanan dan mempersingkat lamanya perizinan investasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan meningkatkan dan mengoptimalkan sinergitas antar stake holder investasi dan melakukan pelatihan dan reformasi birokrasi di bidang perizinan investasi agar daya daing investasi Provinsi Kepulauan Riau meningkat dan investor naik.

REFERENSI

- Afifudin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Bappenas RI. 2019. Laporan Evaluasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.



- Danim S. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko H. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.
- Moeleong L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.